



## BUPATI PATI

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 57 TAHUN 2010

TENTANG

PENGATURAN PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN

INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kabupaten diberi wewenang untuk mengatur Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
  2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
  3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45745);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi daerah. ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119 );
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 21);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 28);
19. Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PATI TENTANG PENGATURAN PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati .
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pati;
5. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi;
6. Penanggung jawab Keuangan Daerah adalah Bupati Pati dan Wakil Bupati Pati.
7. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pati.
8. Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati.
9. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

10. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
11. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Pati sebagai Pemungut Pajak Daerah.

#### Pasal 2

Pemberian dan pemanfaatan Insentif pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi obyektif daerah.

### BAB II

#### INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK

##### Bagian Kesatu

##### Penerima Insentif

#### Pasal 3

- (1) Insentif sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) secara Proporsional diberikan kepada :
  - a. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab Keuangan Daerah;
  - b. Sekretaris Daerah sebagai Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - c. Pejabat dan Pegawai Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing;
  - d. Pejabat dan Pegawai Kecamatan sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing;
  - e. Pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana pemungut Pajak.
- (2) Pemberian Insentif kepada Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi di daerah yang bersangkutan.

#### Pasal 4

- (1) Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dapat diberi Insentif apabila mencapai target kinerja.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan :
  - a. kinerja Instansi;
  - b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak;
  - c. pendapatan daerah; dan
  - d. pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (4) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (5) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

#### Bagian Kedua

#### Sumber Insentif

#### Pasal 5

Insentif bersumber dari pendapatan Pajak Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketiga

#### Besaran Insentif

#### Pasal 6

- (1) Besarnya Insentif ditetapkan sebesar 5 % ( lima perseratus ) dari rencana penerimaan Pajak Daerah dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Pajak.

- (2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan.

#### Pasal 7

- (1) Besarnya pembayaran Insentif Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d untuk setiap bulannya dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan Pajak Daerah tahun anggaran sebelumnya paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat, yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Insentif Pajak Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
  - a. Pajak Hotel;
  - b. Pajak Restoran;
  - c. Pajak Hiburan;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. Pajak Penerangan Jalan;
  - f. Pajak Galian Golongan C;
  - g. Pajak Parkir.
- (3) Pemberian pemanfaatan insentif pemungutan Pajak Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) sebagaimana daftar terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (4) Pemberian dan pemanfaatan Insentif pemungutan Pajak Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Pemberian dan pemanfaatan Insentif pemungutan Pajak Daerah bagi Pejabat dan Pegawai Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati Kabupaten Pati.

BAB III  
PENGANGGARAN, PELAKSANAAN,  
DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

- (1) Kepala DPPKAD menyusun penganggaran Insentif pemungutan Pajak berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Penganggaran Insentif pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud Ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung.

Pasal 9

Dalam hal target penerimaan Pajak pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian Insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pemberian insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pemberian insentif untuk tahun anggaran 2010 dapat dibayarkan sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2010 dan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pati Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pemberian Biaya Pemungutan/insentif Pajak Daerah kepada Aparat Pemungut Pajak Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.



Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati

pada tanggal 22 Nopember 2010

BUPATI PATI,

TASIMAN

Diundangkan di Pati

pada tanggal 22 Nopember 2010

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI

Kepala Badan Kepegawaian Daerah

HARYANTO, SH,MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19640408 199103 1 011

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2010 NOMOR 657

PENELITIAN PERDA / PERBUP	
JABATAN	PAPAF
WAKIL BUPATI <sup>53</sup> 4-12-10	
SEKDA <sup>40</sup> 12-10	
ASISTEN <sup>Administrasi</sup>	
KABAG HUKUM	
KASIEBAG <sup>Per-uu-an</sup>	
UNIT PELAKSANA	DPPKAD

Plt

1790  
06. 12.

PENELITIAN KOORDINATIF			
TANGGAL	NAMA	KEPALA DAERAH/DINAS/KANTOR/BAGIAN	PAPAF
27/11-10	BREH. Susanto	Kepala DPPKAD	A

664

17-2010

Lampiran : Peraturan Bupati Pati  
 Nomor 57 Tahun 2010  
 Tanggal 22 Nopember 2010

DAFTAR PENGATURAN PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH  
 TAHUN 2010

NO.	JENIS PAJAK DAERAH	PENERIMAAN						TOTAL
		Bupati	Wakil Bupati	Sekda	DPPKAD	KECAMATAN		
						Camat	Petugas Pemungut	
1	Pajak Hotel	0,004	0,0035	0,003	0,0395			0,05
2	Pajak Restoran							
	a. SKPD	0,004	0,0035	0,003	0,0395			0,05
	b. Non SKPD	0,004	0,0035	0,003	0,01975	0,009875	0,009875	0,05
3	Pajak Hiburan	0,004	0,0035	0,003	0,0395			0,05
4	Pajak Reklame	0,004	0,0035	0,003	0,0395			0,05
5	Pajak PPJU	0,004	0,0035	0,003	0,0395			0,05
6	Pajak Galian Gol. C							
	a. SKPD	0,004	0,0035	0,003	0,0395			0,05
	b. Non SKPD	0,004	0,0035	0,003	0,01975	0,009875	0,009875	0,05
7	Pajak Parkir	0,004	0,0035	0,003	0,0395			0,05

BUPATI PATI

PENELITIAN KOORDINATE			
TANGGAL	NAMA	KEPALA BADAN/DINAS/KONTOR/BAGIAN	PARAF
3/12/10	SUDARJO S.SOS	KABID PENDAPATAN.	✓

TASIMAN

PENELITIAN KEPUTUSAN / INSTRUKSI BUPATI	
JABATAN	PARAF
WAKIL BUPATI	
SEKDA 40 4.12.10	✓
ASISTEN... Administrasi	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG PER UJUAN	✓
UNIT PELAKSANA	DPPKAD